

Analisis Implementasi Kebijakan Permendag No. 8 Tahun 2024: Dampak Terhadap Industri Tekstil dan Sektor Terkait

Erni Prasetyani¹, Munir Saputra²

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI¹²

Email: erasetya@gmail.com

Citation: Prasetyani, E., & Saputra, M. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Permendag No. 8 Tahun 2024: Dampak Terhadap Industri Tekstil dan Sektor Terkait *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 5(2), 192–196. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/377>

Received: 30 Desember 2024

Accepted: 18 Januari 2025

Published: 21 Februari 2025

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2025 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract

Regulation of the Minister of Trade (Permendag) No. 8 of 2024 aims to increase the efficiency of strategic goods distribution and strengthen the domestic industry. However, the implementation of this policy faces various challenges, especially in the textile sector which is experiencing increasing production costs and decreasing competitiveness. This study uses qualitative methods with interviews and secondary data analysis to evaluate the effectiveness of this policy. The results of the study indicate that the freedom to import textiles from China without government protection greatly affects business growth and requires a more effective mitigation strategy. This study recommends policy adjustment steps so as not to hinder the growth of the industrial sector.

Keywords: Minister Of Trade Regulation No. 8 Of 2024, Textile Industry, Trade Policy, Economic Impact, Banking Sector

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang strategis dan memperkuat industri dalam negeri. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam sektor tekstil yang mengalami peningkatan biaya produksi dan penurunan daya saing. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan analisis data sekunder untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan import tekstil yang berasal dari China tanpa proteksi dari pemerintah sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis dan memerlukan strategi mitigasi yang lebih efektif. Studi ini merekomendasikan langkah-langkah penyesuaian kebijakan agar tidak menghambat pertumbuhan sektor industri.

Kata Kunci: Permendag No. 8 Tahun 2024, Industri Tekstil, Kebijakan Perdagangan, Dampak Ekonomi, Sektor Perbankan

PENDAHULUAN

Kebijakan perdagangan merupakan alat penting bagi pemerintah dalam mengatur perekonomian nasional. Permendag No. 8 Tahun 2024 diperkenalkan sebagai langkah untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri dengan mengatur distribusi barang strategis, termasuk bahan baku tekstil. Namun, kebijakan ini menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, khususnya bagi industri tekstil yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku akibat keterbatasan impor (Suyanto, 2023) sementara produk tekstil import mendapatkan kemudahan masuk yang justru menambah terpuruknya industri tekstil dalam negeri.

Beberapa perusahaan tekstil besar, seperti PT Sritex, Tbk di Jawa Tengah, telah mengalami kebangkrutan akibat kenaikan biaya logistik dan keterbatasan bahan baku yang berdampak pada efisiensi produksi (Hasan, 2024). Selain itu, wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa ketidakpastian regulasi berdampak pada stabilitas bisnis dan ketenagakerjaan dalam sektor ini.

Hasil wawancara dengan Rahadian, seorang analis ekonomi senior, mengungkapkan bahwa kebijakan ini juga memiliki dampak luas terhadap investasi sektor industri. Menurutnya:

"Permendag No. 8 Tahun 2024 menyebabkan ketidakpastian di kalangan investor, terutama di sektor tekstil. Banyak investor mulai mengalihkan modal mereka ke negara lain yang memiliki regulasi lebih stabil dan tidak memberatkan industri (permendag, 2024)".

Rahadian juga menambahkan bahwa implementasi kebijakan ini perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan efek domino terhadap sektor lain seperti manufaktur pendukung dan perbankan:

"Bank-bank mulai lebih selektif dalam memberikan kredit ke industri tekstil karena risiko gagal bayar meningkat. Jika dibiarkan, ini bisa berdampak sistemik terhadap ekonomi nasional."

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan ini terhadap industri tekstil, sektor perbankan, dan strategi mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif kebijakan ini.



Sumber : www.dataindustri.com

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku usaha tekstil dan pakar ekonomi, serta analisis dokumen kebijakan dan laporan industri.

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam dengan analis perbankan (Hasan, 2024), wawancara dengan analis ekonomi (Rahadian, 2024), data sekunder dari laporan keuangan industri tekstil, analisis kebijakan perdagangan dari jurnal ekonomi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Implementasi Kebijakan terhadap Industri Tekstil

Keterbatasan Akses Bahan Baku. Implementasi Permendag No. 8 Tahun 2024 membatasi impor bahan baku tekstil untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Namun, industri tekstil dalam negeri belum memiliki kapasitas produksi bahan baku yang memadai untuk memenuhi kebutuhan industri besar. Akibatnya, banyak perusahaan mengalami kenaikan harga bahan baku hingga 25% dalam enam bulan pertama sejak kebijakan diterapkan (BPS, 2024). Kenaikan harga ini tidak hanya berdampak pada industri besar tetapi juga pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada bahan baku impor dengan harga lebih terjangkau.

Penurunan Daya Saing Produk. Kenaikan biaya produksi akibat keterbatasan bahan baku berpengaruh langsung terhadap daya saing produk tekstil Indonesia di pasar internasional. Data dari Kementerian Perdagangan (2024) menunjukkan bahwa ekspor tekstil mengalami penurunan sebesar 15% dalam enam bulan terakhir akibat harga produk Indonesia yang kurang kompetitif dibandingkan dengan negara seperti Vietnam dan Bangladesh.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berkurangnya daya saing industri tekstil juga berdampak pada ketenagakerjaan. Menurut laporan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API, 2024), lebih dari 50.000 pekerja telah kehilangan pekerjaan sejak kebijakan ini mulai berlaku. Pemutusan hubungan kerja ini terutama terjadi di sektor manufaktur yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan harga bahan baku dan penurunan permintaan pasar.

Efek Berantai terhadap UMKM. Selain berdampak pada perusahaan besar, kebijakan ini juga memberikan tekanan besar bagi UMKM yang bergerak di sektor tekstil. Banyak usaha kecil yang menggantungkan bahan baku dari impor harus menutup usahanya karena tidak mampu bersaing dengan harga bahan baku lokal yang lebih mahal. Dampak ini berujung pada penurunan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi secara luas.

Dampak Kebijakan terhadap Sektor Perbankan

Peningkatan *Non-Performing Loan (NPL)*. Banyak perusahaan tekstil bergantung pada kredit perbankan untuk operasionalnya. Namun, dengan menurunnya kinerja industri akibat kebijakan ini, banyak perusahaan gagal memenuhi kewajiban keuangan mereka, menyebabkan peningkatan kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan (NPL)*. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) menunjukkan bahwa NPL di sektor tekstil meningkat dari 4,5% menjadi 7,8% dalam enam bulan terakhir.

Restrukturisasi Kredit. Dalam menghadapi situasi ini, beberapa bank mulai melakukan restrukturisasi kredit dengan memberikan relaksasi pembayaran bunga dan perpanjangan tenor pinjaman bagi perusahaan tekstil. Bank Indonesia (2024) mencatat bahwa lebih dari 40% pinjaman di sektor tekstil telah mengalami restrukturisasi guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap stabilitas sistem keuangan.

Penurunan Investasi di Sektor Tekstil. Ketidakpastian yang diakibatkan oleh kebijakan ini membuat investor menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di industri tekstil. Banyak investor yang mengalihkan modal mereka ke negara-negara dengan regulasi yang lebih stabil,

seperti Vietnam dan Bangladesh. Kondisi ini memperlambat inovasi dan ekspansi industri tekstil di Indonesia, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dampak terhadap Industri Pendukung

Penurunan Permintaan di Sektor Logistik. Menurunnya aktivitas industri tekstil juga berdampak pada sektor logistik yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok industri ini. Banyak perusahaan logistik mengalami penurunan permintaan pengiriman bahan baku dan produk jadi akibat penurunan produksi di pabrik-pabrik tekstil. Data dari Asosiasi Logistik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa volume pengiriman barang terkait industri tekstil mengalami penurunan hingga 12% sejak kebijakan diberlakukan.

Dampak pada Manufaktur Pendukung. Selain industri logistik, sektor manufaktur pendukung seperti produsen pewarna tekstil, mesin jahit, dan aksesoris pakaian juga mengalami penurunan permintaan. Perusahaan yang sebelumnya memasok bahan tambahan bagi pabrik tekstil mengalami penurunan pendapatan hingga 18% dalam enam bulan terakhir (BPS, 2024).

Dampak terhadap Tenaga Kerja di Sektor Pendukung. Selain sektor utama, dampak kebijakan ini juga dirasakan oleh sektor tenaga kerja di industri pendukung. Banyak pekerja di industri pewarnaan kain, manufaktur aksesoris pakaian, dan jasa distribusi kehilangan pekerjaan akibat penurunan produksi di industri tekstil utama.

Strategi Mitigasi untuk Mengatasi Dampak Kebijakan

Peningkatan Produksi Bahan Baku Lokal. Untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, pemerintah perlu mempercepat pengembangan industri bahan baku dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui insentif bagi investor yang ingin mendirikan pabrik produksi kapas dan serat sintetis di Indonesia.

Insentif Pajak bagi Industri Tekstil. Untuk membantu industri tekstil bertahan dalam masa transisi kebijakan ini, pemerintah dapat memberikan insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak penghasilan bagi perusahaan yang mengalami penurunan omset akibat kebijakan ini. Langkah ini akan membantu perusahaan menjaga stabilitas finansial mereka dalam jangka pendek.

Peningkatan Infrastruktur Logistik. Pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur logistik untuk mengurangi biaya distribusi bahan baku dan produk jadi. Penyederhanaan prosedur perizinan dan percepatan pembangunan jalan tol serta pelabuhan di daerah industri akan membantu menurunkan biaya logistik yang saat ini menjadi salah satu faktor utama peningkatan harga produk tekstil.

Kemitraan dengan Sektor Perbankan. Bank-bank yang memiliki eksposur tinggi terhadap sektor tekstil dapat berperan lebih aktif dalam mendukung industri dengan menyediakan skema kredit berbunga rendah dan menyesuaikan tenor pinjaman. Dengan langkah ini, sektor perbankan dapat membantu menstabilkan industri tekstil tanpa harus menanggung risiko gagal bayar yang lebih besar.

SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Permendag No. 8 Tahun 2024 memiliki tujuan yang baik dalam memperkuat industri nasional, namun dalam implementasinya menimbulkan berbagai tantangan, khususnya bagi industri tekstil. Keterbatasan bahan baku, meningkatnya biaya produksi, tidak adanya proteksi dari produk import yang berakibat berdampak terhadap sektor perbankan menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan ini.

Rekomendasi utama dari penelitian ini meliputi pengembangan bahan baku lokal, pemberian insentif pajak, proteksi industri pada industri dalam negeri serta perbaikan infrastruktur

logistik untuk mendukung distribusi bahan baku dan produk industri tekstil. Dengan langkah-langkah ini, kebijakan perdagangan dapat lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Laporan Ekonomi Industri Tekstil di Indonesia*.
- Bank Indonesia. (2024). *Dampak Kebijakan Perdagangan terhadap Kredit Perbankan*.
- Hasan, P. (2024). Wawancara mengenai dampak kebijakan terhadap industri tekstil.
- Indrawan, T. (2024). *Persaingan Industri Tekstil di Asia Tenggara*. Jurnal Ekonomi dan Perdagangan, 15(2), 45-60.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Stabilitas Keuangan Semester I*.
- Rahadian, R. (2024). Wawancara mengenai dampak kebijakan terhadap investasi dan perbankan.
- Suyanto, B. (2023). *Analisis Kebijakan Perdagangan dan Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional*. Jurnal Kebijakan Publik, 12(1), 88-105.
- PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024. Pemerintah Minta Sritex Tetap Beroperasi meski Pailit, <https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-minta-sritex-tetap-beroperasi-meski-pailit-1195289>
- Pertumbuhan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, 2011 – 2024, Sumber : <https://www.dataindustri.com/produk/tren-data-pertumbuhan-industri-tekstil-dan-pakaian-jadi/>
- Laporan Keuangan PT Sri Rejeki Isman, Tbk tahun 2020 - 2024, www.idx.co.id